



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	3
---	---	---	---

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman: 1
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post ✓		Tabengan

Gubernur Segera Tindaklanjuti Temuan BPK RI

PALANGKA RAYA, PPOST

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan dengan ketentuan tertentu (DTT).

"Sebagai entitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK, termasuk untuk menindaklanjuti LHP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," katanya, kemarin, di Palangka Raya. Ia minta kepada seluruh jajaran

Pemprov Kalteng untuk bekerja lebih keras serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap SKPD berbasis kinerja sesuai dengan mandatory spending yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sugianto Sabran minta, kepada seluruh jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja lebih keras serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbasis kinerja sesuai dengan mandatory spending sesuai ketentuan.

"Saya juga mengakui dalam pengendalian dan pengawasan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum bergerak secara maksimal. Sehingga masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan," jelasnya.

Gubernur dua periode tersebut juga telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin untuk segera melakukan evaluasi berdasarkan hasil temuan BPK RI. Hal ini penting agar pelaksanaan kinerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya minta agar temuan dan rekomendasi dari BPK RI itu segera ditindaklanjuti. Tidak perlu menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, tetapi harus segera

ditindaklanjuti," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI, M Ali Asyhar mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap delapan LHP kinerja dan DTT semester II tahun 2023. Namun berdasarkan pemeriksaan itu, BPK RI masih menemukan beberapa temuan.

"Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya dan capaian pun sudah ada. Walaupun belum sepenuhnya efektif, untuk itu perlu dilakukan perbaikan," katanya.

Ali menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya mengutamakan perencanaan mandatory spending atas program kegiatan yang telah tersedia dananya.

"Ini mengakibatkan pada target yang termuat dalam RPJMD berpotensi tidak dapat tercapai dan belanja daerah menjadi tidak berkualitas karena tidak sesuai dengan RPJMN dan RPJMD," tandasnya. (ans/P4)